

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI I DPR RI
(KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN PERTAHANAN,
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL, PANGLIMA TNI/MABES
TNI-AD, TNI-AL DAN TNI-AU, BADAN INTELIJEN NEGARA, BADAN
SIBER DAN SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL,
BADAN KEAMANAN LAUT, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, DEWAN
PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT, KOMISI INFORMASI
PUSAT, DAN LEMBAGA SENSOR FILM)**

Rapat ke : 11 (sebelas)
Tahun Sidang : 2024-2025
Masa Persidangan : I
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi (KI)
Pusat dan Dewan Pers
Hari, Tanggal : Senin, 18 November 2024
Pukul : 10.00 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Pimpinan Rapat : 1. Dr. H. Ahmad Heryawan, Lc., M.Si., Wakil Ketua
Komisi I DPR RI
2. Dilanjutkan oleh Dr. Dave Akbarshah Fikarno
Laksono, M.E, Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat : Hernadi, S.IP., M.Si., Kabagset. Komisi I DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II
Lt.1, Jalan. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara : 1. **KPI:**
Peran KPI dalam Pengawasan Penyiaran Pemilu
Pilkada
2. **KIP:**
Peran Komisi Informasi Pusat dalam pengawasan
implementasi Keterbukaan Informasi Publik Badan
Publik Penyelenggara Pemilu dan Penyelesaian
Sengketa Informasi Pilkada
3. **Dewan Pers:**
Peran Dewan Pers dalam Penyelesaian Pengaduan
Pemberitaan terkait Pilkada
Hadir : 1. 23 dari 45 orang Anggota Komisi I DPR RI;
2. Ketua KPI Pusat, Ubaidillah;
3. Ketua KIP, Donny Yoesgiantoro;
4. Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu;
beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) dan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 10.12 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. RDP Komisi I DPR RI dengan KPI, KIP dan Dewan Pers pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Dr. H. Ahmad Heryawan, Lc., M.Si., Wakil Ketua Komisi I DPR RI dan dilanjutkan oleh Dr. Dave Akbarshah Fikarno Laksono, M.E, Wakil Ketua Komisi I DPR RI.

II. KESIMPULAN

1. Komisi I DPR RI telah mendengarkan penjelasan KPI, KIP, dan Dewan Pers terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam Pilkada serentak 27 November 2024, Selanjutnya Komisi I DPR RI mendorong KPI, KIP dan Dewan Pers meningkatkan koordinasi dan sinergi untuk mewujudkan penyiaran yang berkualitas, keterbukaan informasi yang optimal, dan pemberitaan yang berimbang bagi seluruh masyarakat.
2. Komisi I DPR RI meminta KPI, KIP dan Dewan Pers dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada serentak 27 November 2024 agar mempertimbangkan masukan dan pandangan Komisi I DPR RI sebagai berikut :
 - a) KPI Pusat dan KPID mengoptimalkan koordinasi dan sinergi dalam pengawasan penyiaran dan konten yang bebas dari disinformasi dan SARA, menjaga netralitas media, program literasi, serta penegakan sanksi di tingkat nasional dan daerah untuk mewujudkan penyiaran Pilkada yang berkualitas, berimbang, dan berkeadilan bagi masyarakat.
 - b) KIP meningkatkan efektivitas pengawasan keterbukaan informasi, mempercepat penyelesaian sengketa, serta mengoptimalkan implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pilkada.
 - c) Dewan Pers meningkatkan efektivitas penanganan pengaduan, pengawasan netralitas media, profesionalisme wartawan, dan penegakan kode etik untuk mewujudkan pemberitaan Pilkada yang independen dan bertanggung jawab.

- d) KPI, KIP, dan Dewan Pers memperkuat koordinasi dengan KPU dan Bawaslu dalam pengawasan, keterbukaan informasi dan pemberitaan untuk mendukung terselenggaranya Pilkada yang berkualitas.
 - e) KPI, KIP, dan Dewan Pers menjadikan evaluasi pengawasan Pilkada 2024 sebagai dasar penguatan fungsi pengawasan penyiaran, keterbukaan informasi dan etika pers untuk mewujudkan Pilkada yang berkualitas dan berkeadilan di masa yang akan datang.
3. Komisi I DPR RI meminta KPI, KIP, dan Dewan Pers untuk memberikan masukan substansi atas perubahan Undang-Undang Penyiaran yang menjadi RUU Usulan Prioritas Komisi I DPR RI tahun 2025, khususnya substansi tentang pengaturan *platform* digital penyiaran dan penyelenggara *platform* digital penyiaran.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.30 WIB.

KETUA KPI PUSAT

Jakarta, 18 November 2024
KETUA RAPAT,

UBAIDILLAH

DR. DAVE AKBARSHAH FIKARNO LAKSONO. M.E
A-304

KETUA KI PUSAT

DONNY YOESGIANTORO

KETUA DEWAN PERS

DR. NINIK RAHAYU